PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Fisherman90

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kelautan dan perikanan

1.8 Waktu Uji Coba

2022-01-05

1.9 Waktu Penerapan

2023-01-05

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

NAMA INOVASI : FISHERMAN 90

TAHAPAN : PENERAPAN

INISIATOR : OPD

JENIS INOVASI : NON DIGITAL

BENTUK INOVASI : PELAYANAN PUBLIK

URUSAN : PERIKANAN

WKATU UJICOBA : 05 JANUARI 2022

WAKTU PENERAPAN : 05 JANUARI 2023

1. **DASAR HUKUM**

    1. UU NO 45 Tentang Perikanan

    2. Undang-undang No 7. Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya dan petambak garam

    3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

5. Peraturan Bupati Mimika No 29 tahun 2021 tentang penetapan harga patokan, tarif lelang tertutup, dan kuota ikan untuk kebutuhan daerah di TPI Kabupaten Mimika

2. **PERMASALAHAN**

    1. **Permasalahan Makro**

        Secara umum nelayan di Papua menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan keberlanjutan industri perikanan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas nelayan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Program-program pelatihan, peningkatan infrastruktur, akses ke pendanaan, serta penegakan regulasi yang lebih baik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Papua. Beberapa masalah umum yang dihadapi nelayan di Papua antara lain:

3. **Kurangnya Akses Infrastruktur:** Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar.

4. **Keterbatasan Teknologi:** Nelayan di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil tangkapan dan keberlanjutan.

5. **Pendanaan dan Modal:** Banyak nelayan kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membeli peralatan yang lebih baik atau memperbaiki kapal mereka. Keterbatasan akses ke layanan perbankan dan kredit juga menjadi hambatan besar.

6. **Overfishing dan Degradasi Lingkungan:** Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bom ikan atau bahan kimia, merusak ekosistem laut dan mengurangi stok ikan di perairan Papua.

7. **Kurangnya Edukasi dan Pelatihan:** Banyak nelayan tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik.

8. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan hasil tangkapan nelayan.

9. **Masalah Sosial dan Ekonomi:** Kemiskinan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan yang rendah juga merupakan tantangan bagi banyak komunitas nelayan di Papua.

10. **Kendala Regulasi dan Hukum:** Kurangnya penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta peraturan yang tidak mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.

1. **Permasalahan Mikro**

   Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu nelayan mengurangi biaya operasional mereka. Namun, nelayan di Papua sering menghadapi berbagai masalah terkait subsidi BBM ini. Berikut adalah beberapa masalah utama:

2. **Distribusi yang Tidak Merata**: Karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, distribusi BBM bersubsidi ke daerah-daerah terpencil di Papua seringkali tidak merata. Banyak nelayan di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

3. **Penyalahgunaan dan Penyelewengan**: Ada kasus-kasus di mana BBM bersubsidi tidak sampai ke tangan nelayan yang membutuhkan karena adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. BBM bersubsidi kadang-kadang dijual ke pihak lain dengan harga lebih tinggi.

4. **Keterbatasan Kuota**: Kuota BBM bersubsidi yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan di Papua. Ini menyebabkan sebagian nelayan harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi.

5. **Prosedur Administratif yang Rumit**: Prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan memerlukan dokumen-dokumen tertentu yang sulit diakses oleh nelayan, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang memiliki pendidikan formal.

6. **Ketergantungan pada BBM**: Kebijakan subsidi BBM dapat menciptakan ketergantungan yang tinggi pada BBM, sehingga nelayan menjadi rentan terhadap fluktuasi harga BBM dan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu.

7. **Kurangnya Informasi dan Sosialisasi**: Banyak nelayan yang kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan subsidi BBM dan bagaimana cara mendapatkan akses ke subsidi tersebut.

1. **ISU STRATEGIS**
2. **GLOBAL**

   Perikanan laut merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian global dan ketahanan pangan. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai isu global yang kompleks dan memerlukan perhatian serta tindakan dari komunitas internasional. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi perikanan laut secara global:

3. **Overfishing (Penangkapan Ikan Berlebihan)**:

   - Banyak stok ikan di lautan dunia yang telah dieksploitasi secara berlebihan, menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.

   - Overfishing juga mengancam keberlanjutan industri perikanan dan mata pencaharian nelayan di berbagai negara.

4. **Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing**:

- Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur merupakan masalah besar yang merusak sumber daya laut dan menghambat upaya konservasi.

- IUU fishing seringkali dilakukan oleh kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional tanpa mematuhi peraturan atau kuota yang telah ditetapkan.

5. **Perubahan Iklim**:

   - Perubahan iklim mempengaruhi suhu air laut, arus, dan pola migrasi ikan, yang berdampak pada ketersediaan dan distribusi ikan.

   - Asidifikasi laut akibat peningkatan kadar CO2 juga berdampak negatif pada kehidupan laut, termasuk spesies yang menjadi sumber makanan bagi ikan komersial.

6. **Destruksi Habitat**:

   - Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan metode destruktif (misalnya, penggunaan dinamit atau trawl) merusak habitat laut seperti terumbu karang dan dasar laut.

   - Pembangunan pesisir dan polusi juga berkontribusi terhadap degradasi habitat laut.

7. **Plastik dan Polusi Laut**:

   - Limbah plastik di laut mengancam kehidupan laut dan dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui ikan yang tertelan plastik.

   - Polusi dari bahan kimia dan limbah industri juga mencemari ekosistem laut, merusak habitat, dan membahayakan kesehatan manusia.

8. **Ketergantungan pada Stok Ikan Liar**:

   - Ketergantungan yang tinggi pada stok ikan liar membuat industri perikanan rentan terhadap fluktuasi populasi ikan yang disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan faktor lingkungan lainnya.

9. **Keamanan Pangan dan Mata Pencaharian**:

   - Jutaan orang di seluruh dunia bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama dan mata pencaharian.

   - Penurunan stok ikan dan perubahan dalam industri perikanan dapat berdampak serius pada keamanan pangan dan ekonomi komunitas pesisir.

10. **Kurangnya Pengelolaan Berkelanjutan**:

- Pengelolaan perikanan yang tidak efektif atau kurang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut.

- Kurangnya kerjasama internasional dalam pengelolaan perikanan juga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

11. **NASIONAL**

    Nelayan di Indonesia menghadapi berbagai isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kesejahteraan mereka serta keberlanjutan sektor perikanan. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi oleh nelayan Indonesia:

12. **Ketergantungan pada Alat Tangkap Tradisional**: Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang kurang efisien. Hal ini mempengaruhi hasil tangkapan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

13. **Akses Terbatas ke Pasar**: Nelayan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, memperburuk masalah ini.

14. **Subsidi BBM**: Distribusi BBM bersubsidi tidak merata dan sering kali tidak mencapai nelayan di daerah terpencil. Selain itu, prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan birokratis.

15. **Penyalahgunaan dan Penyelewengan Subsidi**: Penyelewengan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu membuat nelayan kecil sulit mendapatkan BBM yang mereka butuhkan untuk melaut.

16. **Degradasi Lingkungan dan Habitat Laut**: Aktivitas penangkapan ikan yang destruktif, polusi laut, dan perubahan iklim menyebabkan degradasi habitat laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove, yang berdampak negatif pada populasi ikan.

17. **Perubahan Iklim**: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air laut, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan produktivitas perikanan.

18. **Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan**: Banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang teknik perikanan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik.

19. **Overfishing dan IUU Fishing**: Penangkapan ikan berlebihan dan aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) merusak stok ikan dan mengancam keberlanjutan perikanan.

20. **Ketidakpastian Hukum dan Regulasi**: Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang tidak jelas atau berubah-ubah membuat nelayan kesulitan dalam mematuhi peraturan dan menjalankan usaha mereka dengan aman.

21. **Masalah Sosial dan Ekonomi**: Nelayan sering kali hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya. Ketergantungan pada hasil tangkapan yang tidak menentu juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

22. **Konflik Ruang Laut**: Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan industri atau kegiatan lain seperti pariwisata dan pertambangan laut sering terjadi, terutama terkait dengan penggunaan ruang

1. **LOKAL**

   Ketergantungan nelayan Papua terhadap BBM yang cukup tinggi membuat nelayan rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi nelayan. Beberapa solusi yang menjadi isu untuk persoalan tersebut adalah:

- **Peningkatan Infrastruktur**: Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi di Papua untuk memastikan BBM bersubsidi dapat dijangkau oleh nelayan di daerah terpencil.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum**: Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelewengan subsidi BBM untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan.
- **Penyederhanaan Prosedur**: Menyederhanakan prosedur administratif untuk mendapatkan BBM bersubsidi sehingga lebih mudah diakses oleh nelayan.
- **Sosialisasi dan Edukasi**: Melakukan sosialisasi yang intensif kepada nelayan mengenai kebijakan subsidi BBM dan cara mengaksesnya. Pihak berwenang dapat bekerjasama dengan organisasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi ini.
- **Diversifikasi Energi**: Mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti energi surya atau biofuel, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

1. **METODE PEMBAHARUAN**
    1. **KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI**

Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut:

1. Subsisdi BBM untuk nelayan kurang terarah dan rawan penyelahgunaan.

    1. Untuk mengujukan permohonan rekemendasi subsidi nelayan harus mendatangi kantor dinas perikanan

        1. Nelayan harus mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu untuk mendapatkan pelayanan surat rekomendasi dengan jarak tempuh 50 KM dengan biaya transportasi.Rp 200.000 s/d 500.000.

1. **KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI**

Kondisi setelah diterapkannya inovasi Fisherman 90 sadalah sebagai berikut:

1. Subsisdi BBM untuk nelayan lebih terarah dan mampu menghindari penyalahgunaan subsidi.

    1. Nelayan tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Perikanan Mimika untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk memperoleh subsi BBM bagi nelayan, sehingga dapat mengefktififkan waktu produktif untuk melaut

        1. Nelayan cukup menyampaikan permohonan dan bukti transaski di TPI melalui WA pada nomor. HP. 0812 1237 7690.

1. **KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?**)

Keunggulan dan keunikan inovasi fisherman 90 ini adalah:

1. Biaya murah dan tak perlu aplikasi yang konvensional

    1. Menggunakan platform media sosial

        1. Mudah untuk dipahami dan dilakukan (familiar)

        2. Cepat dan efisien dalam proses penerbitan surat

        3. Dilakukan ditengah berbagai keterbatasan geografis di papua

1. **CARA KERJA INOVASI**

Tahapan dan bisnis proses layanan fiosherman 90 adalah sebagai berikut:

2. Nelayan mengisi form pengajuan subsidi setalah melakukan transaksi atau pelelangan di TPI

3. Petugas TPI akan mengeluarkan bukti transaksi bahwa ybs telah melakukan pelelangan di TPI.

4. Nelayan menyampaikan melalui WA berupa form permohonan yang telah diisi dengan melampirkan bukti tamransaksi lelang di TPI yang menjelaskan bahwa benar nelayan atau pemohon berhak mendapat BBM bersubsidi

5. Setelah petugas dinas perikanan melakukan verifikasi terhadap perijinannya dan hasil penjualan serta permohonan yang bersangkutan

6. Penerbitan surat rekmendasi untuk mendaptkan subsidi BBM sebaui dengan PUU yang berlaku.

TUJUAN INOVASI

Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah:

1. **Membantu meratakan distribusi.**

2. **Mengefektifkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran.**

3. **Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan.**

4. **Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM.**

5. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif.

MANFAAT INOVASI

Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM
    1. Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM
        1. Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud

DAMPAK INOVASI

Dampak inovasi ini adalah:

1. Termotivasinya nelayan untuk melaut
2. Meningkatnya produksi sebagai akibat tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simple
3. Semakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN INOVASI

Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah:

1. **Membantu meratakan distribusi.**

2. **Mengefektifkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran.**

3. **Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan.**

4. **Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM.**

5. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

MANFAAT INOVASI

Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM
    1. Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM
        1. Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud

1.13 Hasil Inovasi

DAMPAK INOVASI

Dampak inovasi ini adalah:

1. Termotivasinya nelayan untuk melaut
2. Meningkatnya produksi sebagai akibat tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simple
3. Semakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah • **Tentang** Kegiatan Usaha Bahan Baakar Minyak dan Gas
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	11-30 SDM	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Derah Kabupaten Mimika Tahun 2024
3	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Derah Kabupaten Mimika Tahun 2024
4	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Derah Kabupaten Mimika Tahun 2024
5	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Derah Kabupaten Mimika Tahun 2024
6	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** DPA Anggaran • **Tentang** DPA Anggaran • **Tentang** DPA Anggaran